

ATOM

A man with glasses and a white long-sleeved shirt is waving his right hand. He is standing outdoors with a blurred green background. The word 'ATOM' is written in large white letters at the top of the page.

Godaan Lama Monopoli Komoditas

*"Nama Badan Penyelenggara
dan Pemasaran
Cengkeh (BPPC)
mungkin sudah dilupakan"*

*A Political Intelligence Review
by ATOM VISI INDONESIA*

**"Rudy Mas'ud secara
tegas memberikan klarifikasi
bahwa sebagian besar anggaran
pengadaan fasilitas..."**

*Dalam Artikel "UPAYA RESTORASI KEPERCAYAAN
PUBLIK RUDY MAS'UD"*

Pesta Babi : Kolonialisme di Zaman Kita

*Pada 7 Mei 2026, sebuah pemutaran film di Universitas Mataram dihentikan
sebelum selesai. Pihak kampus, bersama petugas keamanan, meminta layar dimatikan
dengan alasan menjaga kondusivitas.*

MEI ISSUE 2026

ATOM VISI

PUBLISHED BY ATOM VISI INDONESIA

Chief Executive Officer: **Mukhradis Hadi K.**

Director of Business & Operations: Warijan

Head of Public Affairs & Partnerships: Sartian Setiawan

Strategic Networking Specialist: Andi Bursan Abbas

HR & People Operations : Awal Kurnia Ahmad

Lead Editorial Communication & Media Strategic : Adhitya Anwar

Lead Political & Policy Researcher: A. Mario Farrasda As

Lead Economic & Market Analyst: Liza Faizah Rizqiah

Senior Data Scientific: Darin Sabrina

ATOM VISI INDONESIA lahir dari kesadaran akan meningkatnya kompleksitas kebijakan publik serta dinamika politik-ekonomi yang mempengaruhi arah pembangunan, stabilitas sosial, dan pengambilan keputusan strategis. Kami hadir sebagai platform riset dan analisis yang menjembatani data empiris, konteks kebijakan, dan realitas sosial-ekonomi yang berkembang.

ATOM VISI INDONESIA berfokus pada pembacaan menyeluruh terhadap keterkaitan antara kebijakan, ekonomi, dan tata kelola. Setiap kajian dirancang untuk memahami akar persoalan, struktur kepentingan, serta dampak kebijakan terhadap institusi, sektor ekonomi, dan masyarakat luas.

Dalam praktiknya, ATOM VISI INDONESIA mengedepankan pendekatan riset berbasis data, analisis kontekstual, serta tanggung jawab intelektual. Kami percaya bahwa pemahaman politik-ekonomi yang kuat dapat menjadi fondasi bagi perumusan kebijakan dan strategi yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

ATOM VISI INDONESIA



Godaan Lama
Monopoli Komoditas

Upaya Restorasi
Kepercayaan Publik
Rudy Mas'ud

Pesta Babi :
Dokumenter yang bikin
Aparat Kebakaran
Jenggot

Kebingungan Koperasi
Merah Putih

Didesak Blanket
Overflight Clearance,
Masihkah Kita Menjaga
Langit Indonesia?

Lumpur Belum Kering
Air Kembali Lagi

Godaan Lama Monopoli Komoditas

Nama Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (**BPPC**) mungkin sudah dilupakan. Tapi petani cengkeh Jawa Timur yang melewati tahun 90-an belum tentu lupa bagaimana harga bisa anjlok sampai tidak cukup untuk biaya panen, sementara satu keluarga di Jakarta menikmati monopoli yang berselimut jargon kepentingan nasional.

BPPC dibentuk dengan dalih menstabilkan tata niaga dan melindungi petani. Dalam praktiknya, negara justru menciptakan satu titik kendali yang membuat harga ditentukan dari atas, rente terkonsentrasi, dan petani kehilangan posisi tawar atas komoditas yang mereka tanam sendiri. 20 Mei 2026.

Prabowo berdiri di Rapat Paripurna DPR dan mengumumkan PP baru: seluruh ekspor sawit, batu bara, dan komoditas strategis lain kini wajib lewat satu pintu, PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Prabowo ingin menumpas masalah under-invoicing yang telah merugikan negara sebesar 15.400 triliun rupiah dari 1991 sampai 2024 karena eksportir nakal melaporkan harga lebih rendah dari transaksi nyata. Ini masalah serius yang menghisap kekayaan Indonesia.

Tapi solusinya?

Setiap kali pemerintah Indonesia membangun satu titik kontrol tunggal atas komoditas bernilai triliunan, yang tumbuh justru antrean panjang orang yang ingin duduk di kursi pengendalinya.

Fee pemasaran 0,5 persen saja dari total ekspor komoditas strategis RI menghasilkan Rp5,5 triliun per tahun. Satu persen: Rp11 triliun. Uang sebesar itu, dikelola oleh entitas yang papan direksinya dipilih presiden, tanpa kompetitor, tanpa tekanan pasar, tanpa mekanisme pembandingan harga yang bisa diuji publik.

"Bayangkan betapa menariknya posisi itu di Jakarta."

Niat Prabowo mungkin bersih. Arsitekturnya yang bermasalah. Sistem yang terpusat pada satu entitas punya kelemahan struktural yang sudah kita buktikan berulang kali. Dalam konteks politik Indonesia yang sudah kita kenal beberapa dekade ini, satu titik kendali tunggal hampir selalu berakhir dikuasai kepentingan. Bukan karena orang-orangnya jahat.

Karena sistemnya memang menggoda. POPSI, organisasi petani sawit, sudah bersuara. Mereka menyatakan sentralisasi ini berpotensi menciptakan monopsoni. Satu pembeli di hulu, harga ditentukan dalam ruang tertutup, dan jutaan petani rakyat tidak punya ke mana lagi pergi. Kebijakan yang diklaim memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional justru pertamanya akan menggerogoti daya tawar orang-orang yang paling awal kena dampaknya.



Posisi International

Uni Eropa sedang menekan Indonesia lewat EUDR, regulasi deforestasi yang mengancam akses ekspor sawit ke pasar Eropa. Di tengah tekanan itu, menambahkan lapisan monopoli negara di atas rantai ekspor adalah sinyal yang salah kepada mitra dagang. Sistem eksportir tunggal berbenturan dengan prinsip WTO soal perdagangan terbuka. Importir asing tidak nyaman berhadapan dengan satu tangan yang punya kuasa penuh atas harga dan pasokan, dan ketidaknyamanan itu punya konsekuensi.

Ada ironi besar di sini. Korupsi yang ingin diberantas lewat skema ini tidak hilang, tapi bergeser bentuk. Selama ini, under-invoicing tersebar di ribuan eksportir yang bermain-main dengan laporan harga. Dengan sistem baru, korupsinya terkonsentrasi. Lebih rapi. Lebih susah dilacak, karena hanya satu entitas yang perlu dikuasai untuk mengendalikan semuanya

Solusi Alternatif

Solusi untuk under-invoicing sebenarnya ada, dan tidak butuh monopoli negara untuk menjalankannya. Indonesia perlu aturan transparansi data ekspor secara real-time yang bisa diverifikasi publik, penegakan hukum serius terhadap eksportir nakal, sinkronisasi data bea cukai dengan rekening penerima devisa, rekonsiliasi wajib antara harga kontrak dan harga aktual pembayaran.

Masalahnya, tidak ada satu pun dari langkah itu yang bisa dipakai untuk memelihara loyalitas. Loyalitas dijaga dengan akses. Kekuasaan yang tidak punya sesuatu untuk dibagikan biasanya tidak bertahan lama.

Di negara yang ekonomi biaya tinggi dan korupsi sudah menjadi bagian dari cara sistem bertahan, solusi teknis adalah kemewahan yang sulit dijual secara politis. Bukan karena para pengambil keputusannya tidak tahu bahwa solusi itu ada. Mereka tahu. Tapi pengetahuan tidak pernah cukup kalau insentifnya tidak selaras.

"Selama membangun kekuatan politik di sini masih membutuhkan kue, solusi yang paling masuk akal secara teknis akan selalu kalah dari solusi yang paling berguna secara patronase."





Noni Belanda

Masa Kini

Gejolak politik di Kalimantan Timur mencapai titik nadirnya ketika publik mulai menyoroti serangkaian kebijakan anggaran yang dinilai tidak selaras dengan semangat efisiensi nasional. Sang istri Sarifah Suraidah bahkan mendapatkan julukan "Noni Belanda Masa Kini" dikalangan pengguna internet

Bagaimana Rudy Mas'ud
Kembali Memoles Citranya?

Upaya restorasi kepercayaan publik Rudy Mas'ud

Gejolak politik di Kalimantan Timur mencapai titik nadirnya ketika publik mulai menyoroti serangkaian kebijakan anggaran yang dinilai tidak selaras dengan semangat efisiensi nasional.

Isu utama yang memicu kemarahan kolektif adalah alokasi dana sebesar Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan (rujab) gubernur dan wakil gubernur, yang diperburuk dengan rencana pengadaan mobil dinas jenis Range Rover senilai Rp8,5 miliar. Di tengah kondisi negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, angkaangka tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan sosial (social insensitivity) dari seorang pemimpin.

Persepsi publik mengenai "pemborosan" anggaran ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan akumulasi dari kejenuhan masyarakat terhadap narasi kemewahan pejabat yang sering kali berbanding terbalik dengan kualitas infrastruktur dasar di pelosok Kalimantan Timur yang kurang memadai.

Publik secara intens menyoroti posisi-posisi strategis yang ditempati oleh saudara kandungnya dalam struktur kekuasaan di Kalimantan Timur.



Family Man



Kepribadian Family Man yang begitu kuat membuat Rudy Mas'ud berhasil merangkul keluarganya lebih dekat dalam sistem pemerintahan...

Hasanuddin Mas'ud menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim, **Rahmad Mas'ud** memimpin Kota Balikpapan sebagai wali kota, sementara **Syahariah Mas'ud** duduk sebagai anggota DPRD Kaltim. Sorotan publik semakin menguat setelah penunjukan **Hijrah Mas'ud** sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP), yang oleh banyak pihak dipandang sebagai bukti nyata praktik nepotisme yang berlangsung secara sistematis.

Menelusuri Akar Perencanaan Anggaran

Dalam upaya menjernihkan polemik, Rudy Mas'ud secara tegas memberikan klarifikasi bahwa sebagian besar anggaran pengadaan fasilitas yang kini dipermasalahkan sebenarnya merupakan warisan perencanaan yang telah disusun sebelum ia resmi menjabat sebagai Gubernur. Sebagaimana diatur dalam mekanisme tata kelola keuangan daerah, APBD tahun berjalan biasanya merupakan hasil pembahasan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD pada tahun sebelumnya.

Fakta bahwa anggaran ini telah "diketok" oleh periode kepemimpinan dan legislatif sebelumnya menjadi argumen krusial bagi Rudy untuk melepaskan diri dari tuduhan inisiator pemborosan. Secara administratif, seorang gubernur baru terikat untuk menjalankan APBD yang sudah disahkan, meskipun ia memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi di tengah jalan. Rudy menegaskan bahwa ia tidak pernah secara khusus meminta anggaran tersebut dialokasikan, namun sebagai kepala daerah saat ini, ia menyadari bahwa beban tanggung jawab moral dan akuntabilitas pelaksanaan tetap berada di pundaknya. Persepsi publik mengenai "pemborosan" anggaran ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan akumulasi dari kejenuhan masyarakat terhadap narasi kemewahan pejabat yang sering kali berbanding terbalik dengan kualitas infrastruktur dasar di pelosok Kalimantan Timur yang kurang memadai.

Kegagalan Komunikasi & Slip of Tongue

Krisis yang dihadapi Rudy Mas'ud diperparah oleh serangkaian kegagalan komunikasi politik yang menciptakan resonansi negatif di ruang digital. Dalam sosiologi politik, persepsi sering kali lebih dianggap nyata daripada fakta itu sendiri, dan gaya komunikasi Rudy di awal masa jabatannya dinilai kurang peka terhadap sensitivitas audiens. Istilah "slip of tongue" atau terpeleset lidah menjadi fenomena yang mewarnai interaksi Rudy dengan publik, yang kemudian dimanfaatkan oleh warganet untuk membangun narasi resistensi.

Salah satu insiden yang paling mencolok adalah ketika Rudy mencoba membela keberadaan adiknya di struktur TAGUPP dengan membandingkannya dengan penunjukan Hashim Djojohadikusumo oleh Presiden Prabowo Subianto. Analogi ini dianggap tidak sepadan dan melampaui batas kewenangan seorang kepala daerah, sehingga memicu reaksi keras dari jajaran pimpinan Partai Gerindra Kaltim yang menilai perbandingan tersebut tidak etis.



Program Terlaksana yang Terdistorsi oleh Kurangnya Spotlight

Prestasi Rudy Mas'ud tenggelam oleh hiruk-pikuk kontroversi. Rudy Mas'ud mengakui bahwa fokus pemerintahannya pada kerja nyata di lapangan mengakibatkan kurangnya publikasi dan "konten" sosial media, sehingga banyak program pembangunan yang tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas. Padahal, melalui program "**Gratispol**", pemerintah provinsi telah mencatatkan sejumlah capaian signifikan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan mendesak warga Kalimantan Timur.

Sejak diluncurkan secara resmi pada April 2025 program Gratispol telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Di sektor pendidikan, Pemprov Kaltim telah menjalin kerja sama strategis dengan 53 perguruan tinggi untuk memfasilitasi pendidikan gratis bagi ribuan mahasiswa. Pada November 2025 saja, Gubernur Rudy menyerahkan bantuan pendidikan secara simbolis kepada lebih dari 32.000 mahasiswa.

Begitu pula di sektor kesehatan, di mana warga cukup menunjukkan KTP Kalimantan Timur untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis melalui integrasi data kependudukan dengan sistem jaminan kesehatan daerah. Selain program sosial, capaian pembangunan infrastruktur jalan juga menunjukkan. Selain program sosial, capaian pembangunan infrastruktur jalan juga menunjukkan tren positif.

Target kemandirian jalan provinsi dipatok untuk mencapai 100% pada tahun 2029, dengan realisasi bertahap yang terus dipantau secara ketat. Namun, karena narasi publik lebih didominasi oleh isu renovasi rumah dinas, manfaat internet gratis di 441 desa dan distribusi seragam sekolah bagi 65.000 siswa sering kali dianggap sebagai "kewajiban biasa" daripada sebuah prestasi yang perlu diapresiasi. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam strategi manajemen informasi pemerintah yang gagal membangun narasi penyeimbang terhadap serangan opini negatif.

Tanggung Jawab Personal Rudy Mas'ud

Menghadapi tekanan publik yang kian masif, Rudy Mas'ud mengambil langkah yang jarang ditempuh oleh pejabat publik di Indonesia: menanggung secara pribadi seluruh biaya fasilitas yang menjadi sumber polemik. Langkah ini merupakan inti dari proses "penebusan dosa" yang dimaksud, di mana sang Gubernur memilih untuk menggunakan kekayaan pribadinya demi menghentikan kegaduhan dan mengembalikan kepercayaan rakyat.

Rudy secara terbuka menyatakan bahwa item-item mewah seperti kursi pijat dan akuarium air laut, yang nilainya dianggap fantastis oleh masyarakat, akan ia tanggung secara mandiri tanpa membebani APBD. Ia menegaskan bahwa meskipun item tersebut ada dalam perencanaan awal birokrasi, ia tidak ingin aset tersebut menjadi beban moral bagi pemerintahannya.

Keputusan ini diikuti dengan komitmen untuk melakukan audit terbuka terhadap seluruh paket renovasi senilai Rp25 miliar agar masyarakat dapat melihat secara rinci penggunaan dana daerah dan memastikan tidak ada penyelewengan dalam prosesnya. Namun, secara administratif, niat baik Rudy untuk "membayar sendiri" aset pemerintah menemui tantangan hukum yang kompleks.

Mengatasi Kekhawatiran Nepotisme dan Restorasi Demokrasi

Masalah dinasti politik ditanggapi Rudy Mas'ud dengan langkah yang tidak kalah drastis. Sebagai bentuk respon atas demonstrasi ribuan massa pada April 2026, Rudy secara resmi mengumumkan penghentian peran keluarga dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pencopotan Hijrah Mas'ud dari posisi Wakil Ketua TAGUPP menjadi simbol paling nyata dari pemutusan mata rantai nepotisme yang selama ini dikhawatirkan masyarakat.

Gaya Kepemimpinan Inklusif

Meskipun di awal masa jabatannya Rudy Mas'ud tampak kesulitan dalam menjalin komunikasi yang efektif, dinamika politik yang terjadi telah menempanya menjadi pemimpin yang lebih inklusif dan tidak anti-kritik. Responnya terhadap aksi demonstrasi 21 April 2026 mencerminkan perubahan paradigma kepemimpinan tersebut. Alih-alih merespon dengan represivitas atau pengabaian, Rudy menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para mahasiswa dan masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi mereka.



Penebusan Dosa

Upaya "Penebusan Dosa" tidak hanya berhenti pada tindakan simbolis, tetapi juga pada penguatan sistem pengawasan internal. **Rudy melibatkan BPK dan BPKP untuk mengaudit kembali seluruh kebijakan anggaran yang menjadi kontroversi, menunjukkan bahwa ia tidak memiliki agenda tersembunyi dalam pengelolaan APBD.** Transformasi citra dari seorang pengusaha-politikus yang elitis menjadi pemimpin yang aspiratif adalah proses panjang yang masih terus berjalan, namun langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan adanya komitmen serius untuk membawa Kalimantan Timur ke arah yang lebih baik.

Melalui serangkaian tindakan akuntabilitas yang radikal termasuk tanggung jawab finansial personal dan pembersihan nepotisme ia telah menunjukkan upaya nyata untuk memulihkan mandat moralnya sebagai pemimpin Kalimantan Timur. **Kegagalan komunikasi politik yang pernah terjadi menjadi pelajaran berharga bahwa di tengah kemajuan teknologi informasi, kejujuran dan sensitivitas sosiokultural adalah KUNCI UTAMA DALAM MEMBANGUN NARASI PEMERINTAH YANG KREDIBEL.**



Pesta Babi: Dokumenter yang Bikin Aparat Kebakaran Jenggot

Pada 7 Mei 2026, sebuah pemutaran film di Universitas Mataram dihentikan sebelum selesai. Pihak kampus, bersama petugas keamanan, meminta layar dimatikan dengan alasan menjaga kondusivitas. Dua minggu kemudian, giliran pemutaran di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia di Bogor yang dibubarkan, kali ini oleh personel TNI dan Polri yang datang ke lokasi. Kejadian serupa berulang di NTB, Bali, dan Jawa Barat. Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menyatakan secara terbuka bahwa pemerintah tidak melarang pemutaran film ini. Tapi aparat di lapangan terus membubarkannya.

Film yang memicu semua itu berdurasi sekitar 90 menit dan kini bisa ditonton gratis di YouTube. Judulnya ***Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita***, produksi Watchdoc yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono bersama Cypri Paju Dale. Watchdoc adalah rumah produksi dokumenter yang sejak *Sexy Killers* (2019) dikenal tidak berpura-pura netral. Dandhy memang tidak bermaksud membuat film dalam tradisi dokumenter yang membiarkan penonton menarik kesimpulan sendiri. Posisinya sudah jelas dari awal, dan ia membangun argumen secara sistematis ke arah sana.





Seperti Apa Kasusnya?

Kasusnya berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, Papua Selatan. PSN adalah sebutan untuk proyek yang ditetapkan pemerintah sebagai prioritas pembangunan nasional dengan proses perizinan yang disederhanakan. ***Dalam konteks Merauke, proyek yang dimaksud adalah rencana konversi hutan seluas 2,29 juta hektar menjadi perkebunan tebu untuk bioetanol dan kawasan food estate, program swasembada pangan dan energi.*** Luasnya setara 70 kali Jakarta. Di atas lahan itulah suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu selama ratusan tahun menggantungkan hidup pada hutan sagu.

Film ini mengikuti orang-orang yang tinggal di wilayah itu, mendokumentasikan perubahan yang mereka rasakan sejak proyek berjalan: sungai yang mulai keruh, hutan sagu yang terbuka, dan patok-patok beton yang muncul di dalam kawasan adat. Salah satu adegan yang paling diingat adalah saat anggota suku Awyu di Boven Digoel memasang salib merah di batang pohon sebagai pernyataan penolakan, dengan kamera mengikuti prosesnya tanpa komentar berlebihan dari narator.

Yang membedakan Pesta Babi dari film-film Watchdoc sebelumnya adalah upayanya menelusuri ke lapisan ekonomi-politik di balik proyek tersebut. Film ini tidak berhenti pada kisah masyarakat yang terdampak, tetapi mencoba mengidentifikasi siapa yang sesungguhnya mengambil keuntungan dari PSN itu.

Dua Aktor Antagonis Utama

Dua nama yang paling banyak disorot adalah **Martias Fangjono** dan **Martua Sitorus**. Martias adalah pendiri Surya Dumai Group, salah satu konglomerat kelapa sawit yang membangun bisnisnya di Kalimantan selama puluhan tahun.

Di Merauke, cucunya, Angelia Bonaventure Sudirman, tercatat sebagai pemegang 90 persen saham PT Merauke Sugar Group, yang menjadi induk dari 10 perusahaan pemegang konsesi tebu dalam kluster PSN. Sepuluh nama perusahaan berbeda, satu keluarga di ujungnya. Martua Sitorus adalah salah satu pendiri Wilmar International, perusahaan agribisnis kelapa sawit terbesar di dunia yang berbasis di Singapura.

Forbes menempatkan Martua sebagai orang terkaya ke-18 di Indonesia pada 2024. Di Merauke, Wilmar mengantongi konsesi sekitar 200 ribu hektar untuk perkebunan tebu. Total nilai investasi yang diklaim seluruh konsorsium mencapai Rp100 triliun, dengan konsesi tahap

Film ini juga menampilkan rekaman dari Oktober 2024, ketika **Presiden Joko Widodo hadir dalam upacara tanam tebu perdana PT Global Papua Abadi, salah satu perusahaan dalam konsorsium, dengan Martias dan Martua hadir di sisinya.**

Bagi pembuat film, momen itu merupakan konfirmasi visual tentang hubungan antara proyek negara dan kepentingan bisnis di baliknya. Bagi pendukung proyek, kehadiran presiden adalah bentuk dukungan negara terhadap investasi sah yang akan menciptakan lapangan kerja dan swasembada energi. Film ini jelas berpihak pada pembacaan yang pertama, dan tidak banyak memberi ruang bagi yang kedua.

Pendekatan semacam itu efektif dalam membangun narasi, tapi juga menjadi titik yang paling mudah dikritik. Resensi ini bukan tempat untuk menilai mana pembacaan yang lebih tepat. Yang bisa dicatat adalah bahwa film ini menyajikan data dan nama yang cukup spesifik





Tidak untuk ditelan

Mentah-Mentah

Kelemahan dari pendekatan itu ada di sisi yang sama dengan kelebihanannya. Film yang sudah menetapkan tesis di awal cenderung hanya menampilkan fakta yang mendukung tesis tersebut. Pesta Babi tidak memberi ruang yang cukup bagi perspektif lain, misalnya argumen pemerintah tentang manfaat ekonomi proyek atau pandangan warga yang mungkin melihat peluang dalam pembangunan itu. Bagi penonton yang sudah sepemikiran dengan pembuat film, ini mungkin tidak menjadi masalah. Bagi yang datang dengan pertanyaan terbuka, film ini bisa terasa seperti presentasi satu pihak.

Cypri Paju Dale, sutradara asal Papua yang mengerjakan proyek ini bersama Dandhy, memberi dimensi yang berbeda pada beberapa bagian film. Ada momen-momen yang bergerak lebih lambat dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari subjeknya, di mana film ini terasa lebih seperti dokumentasi daripada argumen. Itu justru bagian yang paling efektif secara sinematik.

Sebagai film, Pesta Babi lebih kuat sebagai jurnalisme visual daripada sebagai karya sinema. Tapi dalam konteks isu yang diangkatnya, itu mungkin pilihan yang disengaja...

"untuk membuat penontonnya bisa memverifikasi sendiri, dan itu nilai tersendiri dalam genre dokumenter investigatif."



Kebingungan Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih (KMP) dirancang sebagai koperasi desa/kelurahan yang berfungsi sebagai sebagai pusat layanan ekonomi lokal yang mencakup distribusi produk, tempat penjualan barang, layanan simpan pinjam, hingga penguatan rantai pasok desa.

Dasar pembiayaan pinjaman program ini didukung oleh
**Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan
PMK Nomor 49 Tahun 2025**



Koperasi Merah Putih

Dalam konsep resminya, koperasi diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi desa, meskipun peran negara tetap sangat dominan, baik dalam pembentukan, pembiayaan, maupun pengawasannya.


Model bisnis KMP pada dasarnya bertumpu pada pembiayaan awal dari pinjaman bank milik negara yang kemudian digunakan untuk membangun aset dan unit usaha produktif. Sejumlah referensi menyebut plafon pinjaman mencapai Rp3 miliar per koperasi dengan bunga 6% per tahun, tenor hingga 6 tahun, dan masa tenggang 6–8 bulan. Dengan demikian, fondasi pembiayaan KMP lebih banyak bertumpu pada leverage dana publik dibanding penghimpunan modal anggota koperasi secara mandiri.

Kebingungan Antar-Stakeholder

Ekosistem pemangku kepentingan dalam program KMP sangat luas, melibatkan kementerian, pemerintah daerah, kepala desa/lurah, bank Himbara, BPKP, hingga kementerian teknis seperti pertanian, kesehatan, BUMN, dan kominfo. Di tingkat desa, kepala desa/lurah bahkan memiliki posisi sebagai pengawas ex-officio, sehingga relasi antara koperasi dan pemerintah desa menjadi sangat dekat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana koperasi masih memiliki kemandirian atau justru berpotensi menjadi perpanjangan birokrasi desa.

Banyaknya pihak yang terlibat membuat orang di lapangan menjadi kebingungan. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengaku tidak mengetahui seperti apa skema rekrutmen, penempatan dan penggajian manajer yang akan direkrut. Padahal pemerintah telah mengatakan bahwa manajer direkrut dengan sistem kontrak PKWT selama dua tahun di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.

Potensi tumpang tindih juga cukup besar karena ruang usaha KMP dapat bersinggungan dengan BUMDes, koperasi lokal yang sudah ada, maupun program lintas kementerian lainnya. Jika sebuah desa telah memiliki BUMDes aktif, sementara KMP juga diberi mandat sebagai pusat layanan ekonomi, maka fungsi distribusi, pembiayaan, dan pengelolaan usaha berpotensi saling bertabrakan. Selain itu, pola koordinasi yang berlapis juga menciptakan kompleksitas tersendiri: desa bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, koperasi kepada anggota, bank kepada regulasi kredit, dan pemerintah pusat kepada target nasional program.





Ambisi Yang Melampaui Kesiapan

KMP menunjukkan ambisi yang sangat besar melalui target pembentukan puluhan ribu koperasi serta pembangunan infrastruktur fisik dalam waktu singkat. Secara politik, target ini menunjukkan komitmen yang kuat, namun terdapat risiko bahwa percepatan tersebut melampaui kesiapan kelembagaan koperasi itu sendiri. Dalam beberapa kasus, pembangunan aset seperti gedung, gudang, dan fasilitas logistik didorong lebih dahulu sebelum model usaha koperasi benar-benar matang.

"Tekanan APBN paling terlihat pada skema pembiayaan dan pembayaran..."

Akibatnya, koperasi berpotensi hanya terbentuk secara administratif tanpa memiliki aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Pengadaan kendaraan operasional sebelum unit usaha berjalan optimal juga memperlihatkan persoalan dalam urutan kebijakan, di mana aset dibangun terlebih dahulu sementara model bisnisnya belum jelas. Dari sisi tata kelola, hal ini cukup berisiko karena kendaraan membawa biaya tetap seperti BBM, perawatan, pengemudi, dan asuransi. Tanpa arus kas yang stabil, aset tersebut dapat berubah menjadi beban operasional alih-alih mendukung produktivitas koperasi. Secara regulatif dan operasional, langkah ini juga dapat dipersoalkan apabila belum disertai analisis kebutuhan, kepatuhan, dan kejelasan spesifikasi usaha koperasi.

ATOM VISI
INDONESIA

Meskipun secara formal dana awal disalurkan melalui mekanisme pinjaman perbankan, pada akhirnya negara tetap memikul kewajiban pembayaran cicilan tersebut.



KOPERASI MERAH PUTIH



KMP memiliki kemiripan dengan model KUD pada era Orde Baru

KUD yang berkembang dari Koperta dan BUUD sejak 1973 juga dibentuk melalui pendekatan top-down dengan tujuan mendukung kebutuhan dasar petani serta distribusi pupuk dan hasil panen. Dalam praktiknya, KUD sering kali lebih berfungsi sebagai instrumen kebijakan negara di desa dibanding sebagai entitas ekonomi yang tumbuh dari kebutuhan anggota. Perbedaannya, KMP saat ini menggunakan skema pembiayaan yang lebih modern dan memiliki cakupan nasional yang lebih besar.

3 Resiko untuk Di Waspadai

KMP membawa tujuan kebijakan yang cukup kuat, terutama dalam mempercepat layanan ekonomi desa, memperluas akses pembiayaan, dan membangun aset produktif di tingkat lokal. Meski demikian, desain program ini juga mengandung tiga risiko utama, yakni target yang ***terlalu ambisius, tata kelola yang berpotensi tumpang tindih, serta tekanan fiskal yang pada akhirnya kembali menjadi beban APBN.***

Oleh karena itu,

"Keberhasilan KMP seharusnya tidak diukur dari banyaknya koperasi yang diresmikan, tetapi dari sejauh mana koperasi tersebut mampu menghasilkan pendapatan, memiliki anggota yang aktif, tidak berbenturan dengan BUMDes, serta benar-benar tumbuh sebagai entitas bisnis yang hidup, bukan sekadar proyek pengadaan aset."



Pelanggaran ruang udara bukan hal baru bagi Indonesia. Dari waktu ke waktu, kasus pesawat asing masuk tanpa izin terus saja muncul. Insiden Bawean tahun 2003 jadi salah satu yang paling diingat.

Ketika itu, pesawat tempur F-18 milik Amerika Serikat terbang melintasi wilayah Indonesia tanpa clearance dan harus dihadang oleh TNI AU. Selama periode 2023-2025, Kepulauan Riau yang terkenal sibuk karena berada di jalur penerbangan internasional, juga menjadi kawasan dimana pelanggaran udara terus berulang.

Pertemuan Antara Dua Kepala Negara

Beberapa waktu lalu publik dihadapkan pada isu bahwa Indonesia akan memberi akses ruang udara (Blanket Overflight Clearance) kepada Amerika Serikat (AS). Isu ini berawal dari pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung di Washington D.C. pada Februari 2026. Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump.

Pertemuan ini dimaksudkan untuk merumuskan kerangka strategis yang disebut sebagai "Era Keemasan Baru" (New Golden Age) bagi aliansi strategis kedua negara. Menurut laporan The Sunday Guardian, dalam pertemuan tertutup tersebut, Presiden Prabowo secara verbal memberikan persetujuan terhadap usulan AS untuk memberikan akses lintas udara yang bersifat menyeluruh bagi pesawat militer mereka di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia.

Persetujuan verbal ini kemudian ditindaklanjuti secara formal oleh Department of War AS. Pada 26 Februari 2026, pihak AS mengirimkan sebuah dokumen bertajuk "Operationalizing US Overflight" kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Dokumen tersebut merinci sebuah mekanisme operasional di mana pesawat militer AS dapat melintasi ruang udara Indonesia hanya melalui sistem notifikasi sederhana, menggantikan prosedur standar yang mengharuskan permohonan izin kasus per kasus (case-by-case clearance) yang selama ini diterapkan secara ketat oleh otoritas Indonesia.

Resistensi Dalam Negeri

Meskipun kesepakatan tingkat tinggi tampaknya telah tercapai di tingkat kepala negara, implementasi teknis dari usulan ini menghadapi resistensi dari dalam negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia memperingatkan bahwa pemberian akses semacam ini berisiko menyeret Indonesia ke konflik regional di luar kepentingannya.

Setelah pertemuan antara Sjafrie Sjamsoeddin dan Pete Hegseth di Pentagon pada 13 April 2026, pemerintah Indonesia melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, memberikan klarifikasi resmi.

Kepengtingan Amerika Serikat

Posisi Indonesia yang berada di jalur penting antara Samudra Hindia dan Pasifik membuatnya sangat krusial bagi pergerakan militer AS. Dengan akses ke ruang udara Indonesia, AS dapat mempercepat respons dalam situasi krisis dan menghindari rute memutar yang kurang efisien. Akses ini juga memungkinkan variasi jalur penerbangan sehingga pergerakan militer lebih sulit diprediksi, terutama dalam potensi konflik di Laut Cina Selatan.

Dari sisi kerja sama kawasan, Indonesia juga dapat menghubungkan jaringan sekutu AS seperti Jepang, Filipina, dan Australia, sehingga mobilitas militer menjadi lebih lancar. Jalur udara Indonesia juga penting untuk mendukung operasi ke Timur Tengah, termasuk dalam konteks ketegangan dengan Iran, karena menawarkan rute tercepat untuk pengiriman personel dan peralatan militer dari Samudra Pasifik.

Kemhan menegaskan bahwa meskipun terdapat draf Letter of Intent (Lol) yang diajukan oleh AS, dokumen tersebut masih bersifat pendahuluan, tidak mengikat secara hukum, dan sedang dalam proses peninjauan internal yang mendalam.



Bahaya Terhadap Kedaulatan Udara dan Politik Bebas Aktif

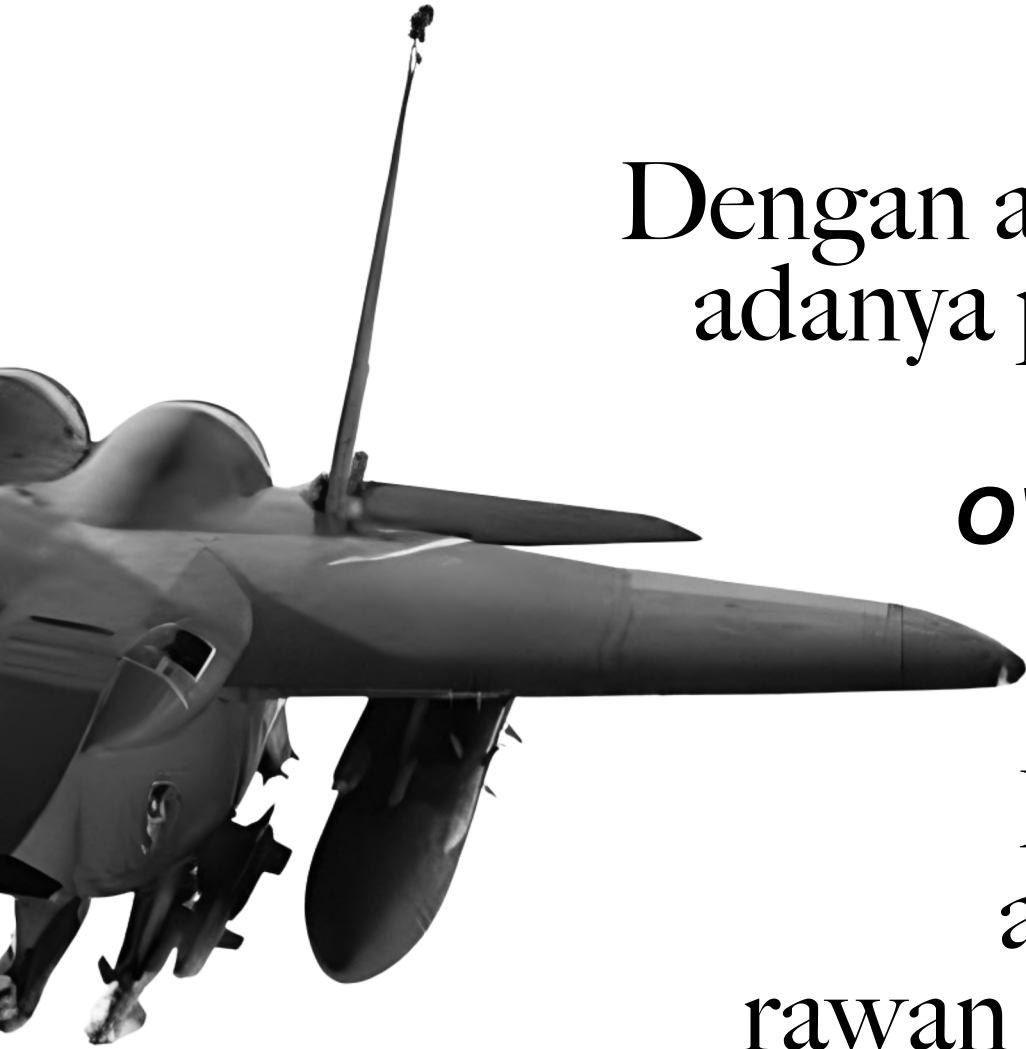


Dalam prosedur eksisting, setiap penerbangan harus memperoleh security clearance dan diplomatic clearance secara individual, dengan waktu respons 3–7 hari kerja. Proses ini divalidasi oleh Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, serta umumnya hanya mencakup operasi logistik, kemanusiaan, dan diplomatik dengan masa berlaku terbatas sesuai durasi misi.

Skema blanket overflight memungkinkan pesawat melintas dengan akses yang lebih terbuka berdasarkan perjanjian jangka panjang, cukup dengan pemberitahuan singkat tanpa perlu menunggu persetujuan khusus. Prosesnya dilakukan melalui komunikasi langsung antar pusat operasi, sehingga pesawat bisa langsung melintas. Cakupan penggunaannya juga lebih luas, termasuk untuk kondisi darurat, respons krisis, hingga latihan militer bersama.

Pemberian akses ini dianggap akan membahayakan kedaulatan ruang udara Indonesia, yang merupakan hak penuh dan eksklusif negara sebagaimana diatur dalam Konvensi Chicago 1944 dan hukum nasional Indonesia. Memberikan izin permanen dapat melemahkan kontrol negara karena hilangnya kewenangan memeriksa tujuan, muatan, dan identitas pesawat asing, sekaligus membuka peluang penyalahgunaan untuk kepentingan intelijen, mengingat kemampuan pesawat militer AS dalam mengumpulkan data sensitif.

Memberikan akses istimewa kepada AS juga dapat merusak persepsi netralitas Indonesia di mata global, terutama di mata Tiongkok sebagai mitra ekonomi utama. Tiongkok bisa melihatnya sebagai kedekatan militer dengan Washington dan merespons secara diplomatik maupun ekonomi. Dalam konteks regional, keputusan ini berisiko melemahkan sentralitas ASEAN, karena dapat memicu negara lain di kawasan untuk membuka akses serupa bagi kekuatan besar, sehingga meningkatkan militerisasi dan potensi konflik proksi di Asia Tenggara.



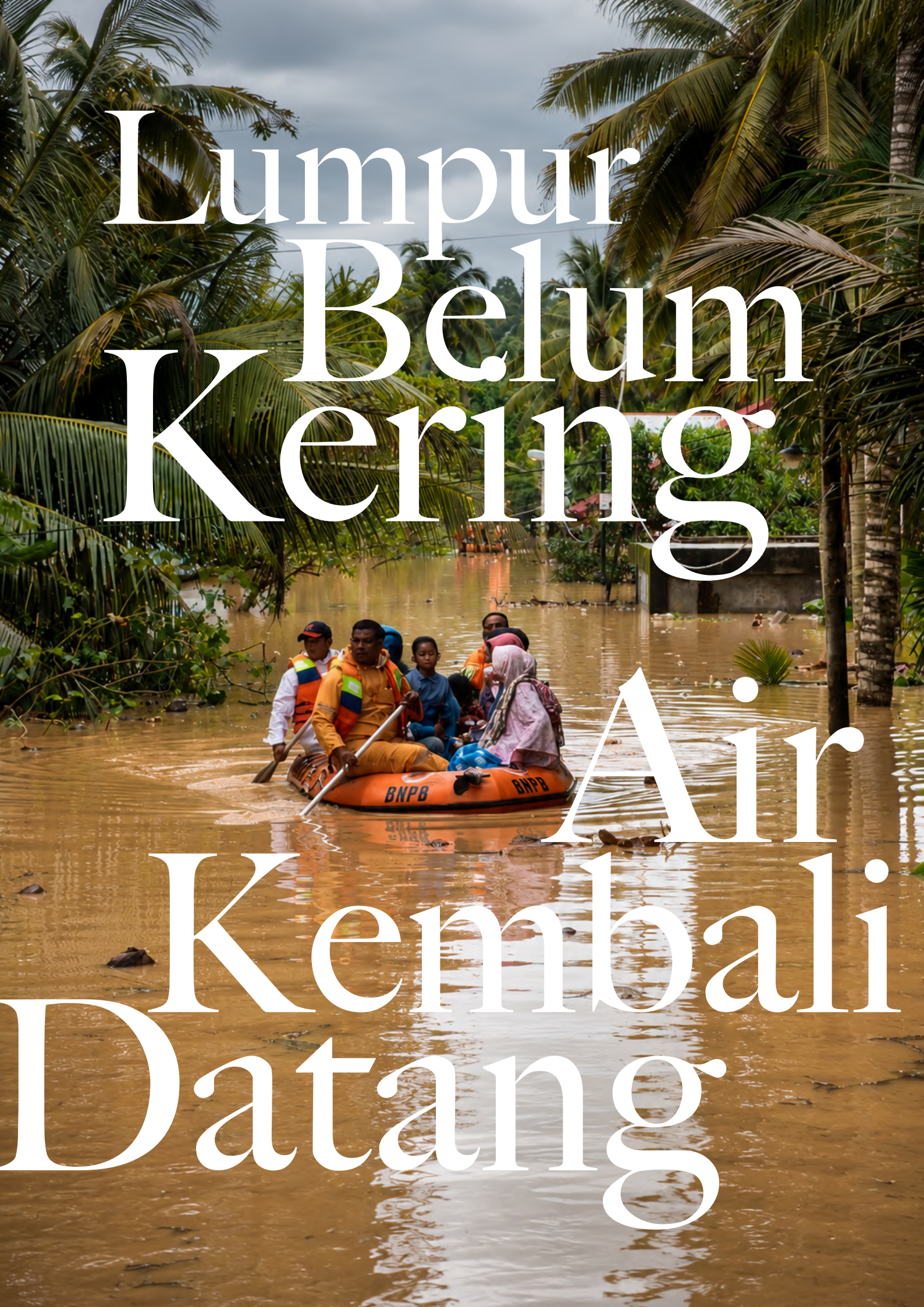
Dengan atau tanpa
adanya perjanjian
blanket
overflight,
ruang
udara
Indonesia
akan tetap
rawan diterobos
oleh kekuatan
asing selama kita
tidak memiliki
kemampuan pengawasan
yang ***mandiri dan kuat***.

Oleh karena itu, prioritas utama negara haruslah pada penguatan ketahanan udara melalui penambahan radar, peningkatan kualitas personel, dan modernisasi alutsista.

Hanya dengan cara inilah Indonesia dapat benar-benar menjadi tuan di rumahnya sendiri dan memastikan bahwa setiap sayap pesawat yang melintasi langit nusantara adalah sayap yang telah mendapatkan izin resmi dari pemegang kedaulatan yang sah. Ketahanan nasional yang tangguh adalah jaminan terbaik bagi keberlanjutan politik Bebas Aktif Indonesia di panggung dunia yang semakin dipengaruhi oleh kekuatan negara-negara adikuasa.

Lumpur
Belum
Kering

Air
Kembali
Datang



SUMATRA



Enam bulan berlalu sejak puncak bencana banjir Sumatera yang merenggut 1204 nyawa pada akhir 2025. Pemerintah dalam berbagai pernyataan resmi menyampaikan optimisme bahwa kondisi di Sumatera, termasuk Aceh, telah berangsur pulih dan berada dalam tahap normalisasi.

Namun, narasi pemulihan tersebut perlu ditinjau kembali ketika dihadapkan pada realitas di lapangan yang menunjukkan proses pemulihan masih jauh dari selesai.

Hingga enam bulan setelah bencana, dampaknya masih nyata dirasakan masyarakat. Lumpur dan material yang terbawa banjir masih dalam proses pembersihan dan belum rampung. Hunian warga yang runtuh terbawa arus juga belum sepenuhnya dibangun kembali.

Aktivitas sosial-ekonomi memang mulai bergerak, tetapi masih berlangsung dalam keterbatasan yang signifikan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa jumlah pengungsi akibat bencana Sumatera mencapai 1.570.482 jiwa. Hingga 19 Februari 2026, tercatat masih ada 12.994 warga terdampak yang harus mengungsi.

Meskipun angka ini menurun drastis, fakta bahwa ribuan warga masih tinggal di tenda selama lebih dari empat bulan mencerminkan bahwa proses penanganan dan pemulihan berjalan relatif lambat.

Ironisnya di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang membersihkan sisa-sisa bencana dan memulihkan kehidupan mereka, banjir kembali datang. Aceh kembali diterjang banjir susulan saat proses rehabilitasi belum rampung. Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (13/4/2026), dilaporkan kondisi memprihatinkan di sejumlah wilayah Aceh yang kembali dilanda banjir. Hujan dengan intensitas tinggi sejak 31 Maret 2026 memicu meluapnya sungai serta longsor di beberapa daerah. Banjir susulan ini merusak dua jembatan darurat yang sebelumnya dibangun pascabencana, hingga memaksa warga yang sempat kembali ke rumah mereka untuk kembali mengungsi. Situasi ini memperlihatkan siklus kerentanan yang belum terputus.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), sejumlah wilayah terdampak dengan tingkat kerusakan yang beragam. Di Kecamatan Ketol, kerusakan jembatan darurat mengganggu akses masyarakat. Dampak juga dirasakan di Desa Lumut serta jembatan Kala III di Kecamatan Linge, termasuk Desa Mendale dan Paya Kumbi di Kecamatan Kebayakan. Selain itu, Desa Gele Pulo dan ruas Jalan Bintang - Simpang Kraf di Kecamatan Bintang turut terdampak, serta Desa Sepakat di Kecamatan Celala yang juga mengalami kerusakan.



Lambatnya pemulihan serta munculnya kembali banjir di tengah proses rehabilitasi mengindikasikan lemahnya kapasitas adaptasi dalam sistem penanganan bencana di Indonesia. Dalam perspektif Complex Adaptive Systems (CAS), tata kelola bencana seharusnya mampu beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan situasi, termasuk mengantisipasi potensi bencana susulan. Sistem yang tidak mampu mengintegrasikan informasi cuaca, kondisi lingkungan, dan tingkat kerentanan wilayah cenderung bersifat reaktif baru merespons setelah bencana terjadi, bukan mencegahnya sejak awal.

Kejadian banjir susulan di Aceh seharusnya membuat negara sadar akan pentingnya integrasi antara respons bencana dan strategi mitigasi jangka panjang. Dalam kerangka Disaster Risk Governance, mitigasi tidak boleh dipisahkan dari proses pemulihan. Berdasarkan Disaster Risk Governance Guidelines dari International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, penanganan bencana seperti pembersihan material, pembangunan hunian, dan perbaikan infrastruktur seharusnya mengadopsi prinsip build back better, yakni membangun kembali dengan mempertimbangkan potensi bencana di masa depan.

Mitigasi bencana susulan menuntut kebijakan berbasis risiko, seperti penataan ruang di daerah rawan, penerapan standar konstruksi tahan bencana, serta perlindungan ekosistem sebagai penyangga alami. Regulasi tata guna lahan dan pembangunan infrastruktur menjadi krusial karena keputusan pembangunan yang abai terhadap risiko justru dapat memperparah dampak bencana di masa depan.

"Saya minta maaf saya
tidak punya tongkat
Nabi Musa,
saya tidak bisa selesaikan
tiga hari, lima hari.
Mungkin dua,
tiga bulan aktivitas
akan benar-benar normal."

Prabowo Subianto

*Presiden Republik Indonesia
di posko pengungsian SMP 2 Wih Pesam,
Bener Meriah pada Jumat, 12 Desember 2025*

An aerial photograph of a volcanic landscape. The top half of the image shows a dense, dark forest covering a ridge. Below the forest, a large, dark, and textured area of lava flow or ash extends across the middle and bottom of the frame. The terrain is rugged and uneven, with various ridges and depressions. The overall color palette is dark, with shades of black, grey, and brown.

ATOM VISI INDONESIA